

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK”

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A.

Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh:

Kelompok 9

Fani Dimas Prasetyo 2313031047

Nur Ayu Dila 2313031055

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Teknik Akuntansi Keuangan Sektor publik” dengan tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd. Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., C.A. dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. Sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah ini.

Kami juga berharap dengan adanya makalah ini mampu berguna serta bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan sekaligus wawasan terkait dengan Teknik Akuntansi Keuangan Sektor publik. Selain itu, kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan makalah ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 3 November 2025

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Sektor Publik	3
2.2 Tujuan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	4
2.3 Teknik-teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik	4
2.4 Manfaat Penerapan Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik.....	9
2.5 Tantangan dalam Penerapan Teknik Akuntansi Sektor Publik.....	10
BAB III PENUTUP	12
3.1 Kesimpulan	12
3.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13
STUDI KASUS	14

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi keuangan sektor publik berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Sebagai proses sistematis yang mencakup pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan, akuntansi sektor publik menyediakan informasi relevan bagi pengambilan keputusan (Gea, 2021). Fokus utama akuntansi sektor publik bukan pada pencapaian laba, melainkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik (Indrayani, 2021).

Tujuan utama penerapannya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar perencanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban penggunaan dana publik (Susansti et al., 2024). Dengan demikian, akuntansi sektor publik menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung prinsip *good governance*.

Berbagai teknik akuntansi seperti akuntansi anggaran, komitmen, dana, kas, dan akrual digunakan untuk mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Handayani, 2019). Penerapan teknik-teknik ini membawa manfaat besar, antara lain meningkatkan kualitas laporan keuangan, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong efisiensi anggaran (Belinda & Costari, 2021; Susanti et al., 2024).

Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya sistem informasi keuangan, disparitas kapasitas fiskal antar daerah, serta lemahnya pengawasan internal (Hendriarto dkk., 2025). Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur, integrasi sistem keuangan, dan penguatan budaya akuntabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan berdaya guna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian akuntansi keuangan sektor publik?
2. Apa tujuan akuntansi keuangan sektor publik?
3. Apa saja teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik?
4. Apa saja manfaat penerapan teknik akuntansi keuangan sektor publik?
5. Apa saja Tantangan dalam Penerapan Teknik Akuntansi Publik?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian akuntansi keuangan sektor publik
2. Untuk mengetahui tujuan akuntansi keuangan sektor publik
3. Untuk mengetahui apa saja teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik
4. Untuk mengetahui apa saja manfaat penerapan teknik akuntansi keuangan sektor publik
5. Untuk mengetahui apa saja Tantangan dalam Penerapan Teknik Akuntansi Publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Akuntansi keuangan sektor publik

Akuntansi keuangan sektor publik merupakan suatu proses sistematis yang meliputi pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi publik. Organisasi publik sendiri adalah entitas yang tidak dimiliki secara privat, melainkan didirikan, dibiayai, dan dioperasikan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Proses akuntansi ini bertujuan menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan dan relevan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Gea, 2021). Dengan demikian, akuntansi keuangan sektor publik berperan penting dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas penggunaan dana publik.

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, termasuk pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta yayasan sosial yang terlibat dalam pengelolaan dana masyarakat. Proses ini tidak hanya mencakup pencatatan dan pelaporan, tetapi juga pengelolaan yang optimal agar sumber daya publik dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan *good governance* melalui elemen transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta karena fokusnya adalah pada pengelolaan dana publik dan penyediaan informasi yang mengutamakan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat. Akuntansi sektor publik melibatkan rangkaian kegiatan seperti pengumpulan, pencatatan, klasifikasi, analisis, penyusunan laporan keuangan, serta aktivitas pengendalian yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya negara (Indrayani, 2021).

2.2 Tujuan Akuntansi Keuangan Sektor publik

Tujuan akuntansi keuangan sektor publik sangat penting dalam mendukung pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang transparan dan akuntabel. Akuntansi sektor publik bertujuan menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk manajemen agar dapat menggunakan sumber daya secara efisien dan ekonomis. Informasi ini membantu manajer dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian operasional sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang telah ditetapkan (Susansti, et al 2024).

Selain itu, tujuan utama lainnya adalah menyediakan akuntabilitas kepada publik dan para pemangku kepentingan. Dengan sistem akuntansi yang baik, pemerintah atau lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pelaporan keuangan yang sistematis dan dapat diandalkan juga berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif untuk mencegah penyimpangan atau salah kelola sumber daya publik.

Akuntansi keuangan sektor publik juga bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan regulasi pemerintah. Ini penting untuk menjaga integritas data keuangan dan memberi dasar yang kuat bagi penilaian kinerja organisasi sektor publik. Melalui laporan keuangan yang lengkap dan jelas, akuntansi sektor publik mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik serta memberikan dasar yang sah untuk evaluasi kinerja dan perencanaan masa depan.

2.3 Teknik-teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Dalam sektor publik, pengelolaan keuangan merupakan aspek yang sangat krusial untuk memastikan bahwa penggunaan dana dan sumber daya publik dapat dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Akuntansi keuangan di sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan transaksi, tetapi juga sebagai sarana untuk melaporkan sekaligus mengendalikan penggunaan anggaran yang berasal dari pajak dan sumber

pendapatan negara atau daerah. Oleh karena itu, teknik-teknik akuntansi yang digunakan dalam sektor publik memiliki karakteristik dan tujuan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dana publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik antara lain terdiri dari beberapa metode yang masing-masing memiliki peran dan fungsi spesifik dalam mendukung proses pelaporan keuangan dan pengendalian anggaran. Teknik-teknik ini tidak bersifat saling meniadakan, sehingga sebuah entitas publik bisa menggunakan satu atau beberapa teknik sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan konteks pengelolaan keuangannya. Menurut (Handayani, 2019) ada Beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi oleh sektor publik:

1. Akuntansi Anggaran

Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah actual dan dicatat secara berpasangan (*double entry*). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sector publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dan realisasi anggaran.

Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas. Akuntansi anggaran (*budgetary accounting*) mengacu pada praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun -akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran dalam siklus perencanaan,

pengendalian, pertanggungjawaban. Ide dibalik akuntansi anggaran ini adalah untuk kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena organisasi yang berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda pula. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan intrinsik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka.

2. Akuntansi Komitmen

Akuntansi Komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan pada saat faktur dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama - sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, manajer perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (*overcommit*). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun–akun tidak memasukkan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (*over commit the budget*).

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat

memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun–akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (*legal liability*) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan.

3. Akuntansi Dana

Akuntansi Dana adalah salah satu teknik akuntansi yang sangat penting dan banyak digunakan dalam sektor publik. Teknik ini dikembangkan khusus untuk mengelola dan melaporkan penggunaan dana yang diperoleh dan dikelola oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah dan lembaga nirlaba, yang memiliki berbagai sumber dana dengan tujuan penggunaan yang berbeda-beda. Dalam sektor publik, dana yang dikelola sering kali bersifat khusus dan terbatas penggunaannya, sehingga menuntut pengelolaan yang sistematis dan transparan agar dana tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan atau peruntukannya.

Prinsip utama dari akuntansi dana adalah pemisahan dan pengelolaan dana secara terpisah berdasarkan sumbernya atau tujuan penggunaannya. Setiap dana direkam dalam catatan akuntansi yang berbeda sehingga memudahkan pelacakan, pengendalian, serta pelaporan yang akurat. Dengan demikian, akuntansi dana menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mencatat masuk dan keluarnya dana sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara spesifik tanpa tercampur dengan dana lain. Akuntansi dana sangat penting dalam sektor publik untuk mendukung akuntabilitas penggunaan dana yang bersifat terbatas atau bersyarat.

4. Akuntansi Kas

Akuntansi Kas adalah teknik pencatatan keuangan yang fokus pada pengakuan transaksi saat kas benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dalam sektor publik, teknik ini masih banyak digunakan karena kesederhanaannya dalam pencatatan dan kemudahan

pengawasan atas arus kas aktual. Dengan akuntansi kas, penerimaan kas dari berbagai sumber, seperti pajak atau pendapatan lain, dicatat secara langsung ketika kas tersebut masuk, sedangkan pengeluaran dicatat saat kas benar-benar dibayarkan.

Dalam sektor publik, akuntansi kas menjadi penting karena dana publik harus dikelola dengan sangat transparan dan akuntabel, serta membutuhkan pengawasan yang mudah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Dengan menggunakan sistem akuntansi kas, pencatatan keuangan sederhana dan jelas, yang membantu menghindari manipulasi data serta memastikan bahwa dana benar-benar tersedia dan digunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Akuntansi Akrual

Akuntansi Akrual merupakan teknik pencatatan keuangan yang dianggap lebih unggul dibandingkan dengan akuntansi kas, khususnya dalam konteks sektor publik yang memerlukan laporan keuangan yang andal dan komprehensif. Teknik ini mencatat pendapatan dan biaya pada saat transaksi tersebut terjadi, bukan hanya saat kas diterima atau dibayarkan. Dengan demikian, laporan keuangan berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih lengkap, akurat, dan relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yang memerlukan informasi menyeluruh tentang kondisi keuangan entitas publik.

Penerapan teknik akuntansi akrual penting karena menyediakan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Informasi yang dihasilkan bukan hanya merekam arus kas, tetapi juga mencakup aset, kewajiban, pendapatan yang masih harus diterima, serta beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Sehingga pihak pengelola keuangan publik dan pemangku kepentingan dapat lebih memahami posisi keuangan nyata, menganalisis kinerja keuangan dengan detail, serta membuat perencanaan strategis berdasarkan data yang valid.

2.4 Manfaat Penerapan Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Penerapan teknik akuntansi keuangan sektor publik memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi publik. Sistem akuntansi yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai fondasi bagi transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana public. Berikut manfaat penerapan teknik akuntansi keuangan sektor publik:

- 1. Meningkatkan Kualitas dan Keandalan Laporan Keuangan**

Penerapan teknik akuntansi sektor publik memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan sistematis. Hal ini membuat laporan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan dan publik sehingga kinerja keuangan pemerintah dapat dianalisis dengan tepat. Laporan berkualitas juga meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan (Belinda & Costari, 2021).

- 2. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas**

Teknik akuntansi yang baik membantu menciptakan transparansi dalam penggunaan dana publik. Melalui laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas publik. Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan korupsi, serta memupuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Susanti, et al 2024).

- 3. Mendukung Perencanaan dan Penganggaran yang Efisien**

Data keuangan yang disajikan oleh sistem akuntansi sektor publik membantu dalam perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan. Pemerintah dapat menyusun anggaran lebih terstruktur dan tepat sasaran, yang pada akhirnya menghasilkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.

- 4. Meningkatkan Kepercayaan Publik**

Dengan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, masyarakat menjadi lebih percaya kepada pemerintah. Kepercayaan ini sangat

penting untuk membangun hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara.

5. Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
Teknik akuntansi sektor publik membantu pemerintah menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kesetaraan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

2.5 Tantangan dalam Penerapan Teknik Akuntansi Publik

Penerapan teknik akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia merupakan langkah penting dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun budaya organisasi (Hendriarto, dkk 2025). berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan teknik akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak aparatur pemerintah belum memiliki kompetensi akuntansi berbasis akrual yang memadai sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan, klasifikasi akun, dan keterlambatan pelaporan keuangan. Penelitian Hendriarto dkk. (2025) menunjukkan bahwa sekitar 75% instansi pemerintah masih kekurangan pelatihan dan tenaga ahli di bidang akuntansi pemerintahan.

2. Keterbatasan Infrastruktur Sistem Informasi

Sistem pelaporan seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan e-Budgeting belum digunakan secara optimal di seluruh daerah. Masih terdapat kendala teknis dalam integrasi sistem antar unit kerja yang menyebabkan proses konsolidasi laporan keuangan berjalan lambat.

3. Keterbatasan Infrastruktur Sistem Informasi

Sistem pelaporan seperti Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

dan e-Budgeting belum digunakan secara optimal di seluruh daerah. Masih terdapat kendala teknis dalam integrasi sistem antar unit kerja yang menyebabkan proses konsolidasi laporan keuangan berjalan lambat.

4. Disparitas Kapasitas Fiskal dan Kelembagaan

Perbedaan kemampuan fiskal dan kapasitas kelembagaan menyebabkan ketimpangan penerapan akuntansi akrual antara pemerintah pusat dan daerah. Hendriarto dkk. (2025) mencatat bahwa tingkat kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di tingkat pusat mencapai 95%, sementara di daerah rata-rata hanya 82%.

5. Kelemahan Pengawasan Internal

Banyak instansi pemerintah belum memiliki sistem pengawasan keuangan berbasis risiko yang memadai. Sebagian besar instansi belum mampu menerapkan audit internal secara efektif, sehingga kesalahan pelaporan dan ketidakpatuhan terhadap standar masih sering terjadi.

6. Tekanan Institusional yang Bersifat Formalistik

Penerapan standar akuntansi sering kali dilakukan karena tekanan lembaga pengawas seperti BPK atau Kementerian Keuangan, bukan karena kesadaran internal terhadap pentingnya akuntabilitas publik. Hal ini menyebabkan penerapan akuntansi lebih bersifat formalistik dan simbolik daripada substantif.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Akuntansi keuangan sektor publik memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Melalui proses pencatatan, pelaporan, dan pengendalian yang sistematis, akuntansi sektor publik menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu pengambilan keputusan serta memastikan pertanggungjawaban penggunaan dana publik secara efektif. Penerapan berbagai teknik akuntansi seperti anggaran, komitmen, dana, kas, dan akrual juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Meskipun demikian, penerapan akuntansi sektor publik masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur sistem informasi yang belum optimal, serta lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sistem pelaporan, dan penegakan budaya akuntabilitas agar pengelolaan keuangan publik dapat berjalan lebih transparan, efisien, dan mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas.

3.2 Saran

Pemerintah perlu meningkatkan kompetensi aparatur di bidang akuntansi sektor publik melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat sistem informasi keuangan yang terintegrasi, serta memperbaiki mekanisme pengawasan internal agar penerapan akuntansi sektor publik berjalan lebih efektif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Costari, N., & Belinda, P. A. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58-77.
- Gea, I. R. (2021). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan manajemen*, 1(1), 84-93.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*. Poliban Press.
- Hendriarto, P., Sangapan, L. H., Paryanti, A. B., Manurung, A. H., & Manurung, A. (2025). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia: Kajian Sistematis atas Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Jurnal Greenation Ilmu Akuntansi*, 3(2), 59-69.
- Indrayani, I. (2022). *Modul akuntansi sektor publik*.
- Susanti, E., Yolandasari, H. N., & Meilani, P. (2024). Implementasi Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Instansi Pemerintah. *Bulletin of Community Engagement*, 4(3), 165-180.

STUDI KASUS

Dugaan penyimpangan anggaran dana desa kembali mencuat di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Terbaru dugaan tersebut muncul pada anggaran Dana Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang. Dimana, Kepala Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, Pujiyanto, Diduga memalsukan Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024. Hal itu dilihat dari beberapa program kegiatan yang menggunakan DD T.A 2024 baru dilaksanakan atau baru selesai pada tahun 2025 setelah DD TA 2025 cair. Sementara beberapa item kegiatan yang telah programkan pada tahun 2024 seharusnya telah diselesaikan sebelum pengajuan APBDes tahun 2025. Yang menjadi sorotan maupun pertanyaan publik, adalah anggaran DD tahun 2024 tersebut dikemanakan, dan bagaimana bisa pengajuan APBDes tahun 2025 bisa diajukan sekaligus dicairkan. Sementara pekerjaan kegiatan Tahun 2024 belum selesai bahkan ada yang baru dilaksanakan setelah DD tahun 2025 cair. Sementara itu, informasi yang disampaikan Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya, ada beberapa pekerjaan desa Sabah Balau Tahun Anggaran 2024 yang belum selesai, di antaranya:

1. TPT jln Siswo volume 300 meter anggaran Rp 76.461.000 progres 0%
2. TPT gang Krisna volume 200m anggaran Rp 35.320.000 progres 30 meter
3. pembangunan pariwisata desa anggaran Rp 107.615.500 Progres pembelian 5 gajebo

Pertanyaan:

1. Dari kasus dugaan pemalsuan LPJ Dana Desa di Desa Sabah Balau, bagaimana faktor ketidaksesuaian antara waktu pelaksanaan program dan pencairan dana dapat mempengaruhi kredibilitas dan akuntabilitas keuangan desa?
2. Mengingat adanya kegiatan desa tahun 2024 yang belum selesai namun dana tahun 2025 sudah dicairkan, apa tantangan utama dalam penerapan teknik akuntansi sektor publik yang harus diatasi agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan akuntabel?